

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan juga menghasilkan penelitian yang berbeda.

Penelitian Liyanto dan Anam (2019) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan frekuensi jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Penelitian Noviantari dan Ratnadi (2015) menyatakan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh negatif pada konservatisme akuntansi, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur tahun 2010-2013 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 241. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

Penelitian oleh Suharni, dkk (2019) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris, *leverage*, intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan profitabilitas, *cash flow* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012-2017. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

Penelitian oleh Sholikhah, dkk (2020) menyatakan bahwa mekanisme *good corporate governance* (komisaris independen dan kepemilikan saham) dan *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dan sebanyak 57 perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

Penelitian Ramadhani dan Sulistyowati (2019) menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 dan sebanyak 14 perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

Penelitian oleh Wulandini dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 dan sebanyak 33 perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

Penelitian oleh Maharani dan Kristanti (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan intensitas modal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 dan sebanyak 120 perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi data panel.

Penelitian oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan institusional dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 dan sebanyak 114 perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik regresi linier berganda.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan adalah hubungan antara pihak pemilik (*principal*) dengan pihak agen (*agent*). Menurut Jansen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan menyatakan bahwa pemegang saham sebagai

prinsipal dan manajemen sebagai agen dimana penerapannya ada kemungkinan pihak manajemen tidak selalu bertindak demi kepentingan yang terbaik bagi principal. Nuratama (2011) menyatakan terjadinya konflik agensi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yakni prinsipal sebagai pihak yang memberi kontrak atau pemegang saham dan agen sebagai pihak yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya juga sama-sama menghindari adanya risiko (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya pihak manajemen akan melaporkan laba oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan dirinya. Salah satu cara agen untuk memaksimalkan laba dengan melakukan *earnings management*. Hal ini disebabkan laba menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola kegiatan perusahaan yang nantinya agen berfokus untuk meningkatkan laba dengan cara menyembunyikan beberapa kondisi dari prinsipal.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentunya lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Oleh karena itu, seharusnya manajer selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Sinyal yang diberikan manajer yaitu melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi.

Rozania, et al (2013) menjelaskan bahwa adanya informasi asimetri yang menimbulkan dua masalah potensi yaitu:

1. *Adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak mengetahui apakah dalam pengambilan keputusan pihak *agent* menggunakan informasi yang akurat di laporan keuangannya.
2. *Moral hazard* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak diketahui oleh *principal*, sehingga agen dapat melakukan poin-poin yang tidak terdapat pada kontrak kerja.

Menurut Muljono (2008) berpendapat bahwa ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan pihak manajemen untuk mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang tinggi, mendorong pihak manajemen untuk memainkan angka akuntansi sesuai yang diinginkan, sehingga nantinya laporan keuangan akan berdampak menyesatkan para pengguna..

### **2.2.2 Konservatisme Akuntansi**

Menurut Watts (2003), prinsip konservatisme adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengatur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan utang yang kemungkinan akan terjadi. Menurut Basu (1997) menjelaskan konservatisme tidak berarti bahwa semua arus kas pendapatan harus diterima sebelum keuntungan diakui, melainkan arus kas tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Menurut Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 FASB mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dengan maksud

mengantisipasi resiko yang melekat dan akan berdampak pada eksistensi perusahaan dengan pertimbangan yang memadai. Jadi, prinsip konservatisme akan membebankan biaya mengakui rugi pada periode terjadinya, sebaliknya mengakui laba atau pendapatan apabila benar-benar telah terealisasi, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih rendah (*understatement*) pada periode yang bersangkutan dibandingkan jika perusahaan menganut prinsip yang lebih optimis. Apabila perusahaan berikutnya tidak terjadi atau terjadi penurunan biaya, atau pendapatan telah terealisasi, maka laba periode berikutnya akan dilaporkan lebih tinggi jika perusahaan tersebut menggunakan prinsip konservatisme, sehingga laba yang dihasilkan lebih berfluktuatif (Hendriksen dan Van Breda,2000)

LaFond dan Watts (2006) dalam Haniati dan Fitriany (2010) berpendapat bahwa laporan keuangan yang berdasarkan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan kecurangan laporan keuangan serta mengurangi *deadweight loss* (biaya agensi) yang muncul sebagai akibat dari asimetri informasi (kondisi dimana pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor). Asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan yaitu *overstate* laba. Hal ini dikarenakan laba dapat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Kinerja perusahaan akan mempengaruhi harga saham, sehingga dapat dijadikan alasan manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Konsep konservatisme disarankan untuk tetap digunakan dalam praktik akuntansi karena dapat menguntungkan pada saat kontrak dengan pihak-pihak dalam

maupun luar perusahaan dan mengurangi perilaku opportunistik manajer, meningkatkan nilai perusahaan dan mencegah adanya potensi tuntutan hukum.

Menurut Watts (2003) menyatakan para peneliti biasanya menggunakan tiga bentuk cara pengukuran untuk menyatakan konservatisme, yaitu :

#### 1. *Net Asset Measure*

Ukuran ini digunakan untuk menilai aset yang *understated* dan kewajiban yang *overstated*. Salah satu model pengukurannya dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai perusahaan. (Beaver dan Ryan, 2000). Jika rasio yang lebih dari satu, maka diindikasikan dengan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

#### 2. *Earning /Stock Return Relation*

Pengukuran konservatisme dapat dikaitkan dengan estimasi/negatif *return* saham. Kaitannya dengan konservatisme adalah acuan untuk memverifikasi apakah *gain/loss* dapat diakui. Jika laba diakui, maka net asset perusahaan meningkat, sebaliknya jika rugi diakui, maka net aset perusahaan menurun. Jadi, *return* yang positif menandakan adanya peningkatan net asset sedangkan *return* yang negatif menandakan penurunan net asset. Menurut Siswanto (2012), jika rugi itu menjadi subjek yang menandakan adanya verifikasi lebih sedikit tingkatannya, maka laba akan merespon rugi lebih cepat daripada laba.

#### 3. *Earning/Accrual Measures*

Terdapat tiga model cara pengukurannya yaitu:

a. Model Givoly dan Hayn (2000)

Model ini memfokuskan konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. (Dwiputro, 2009). Konservatisme menghasilkan akrual negatif terus menerus. Maksud dari akrual ini adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif, maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Landasannya bahwa konservatisme adalah menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan konservatisme akuntansi karena depresiasi adalah alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan.

b. Model Zhang (2007)

Pengukurannya menggunakan konservatisme akrual yang didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi menunjukkan pencatatan kejadian buruk (*bad news*) dalam perusahaan contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya, konservatisme akrual dikalikan dengan -1 dengan tujuan mempermudah analisa. Semakin tinggi konservatisme akrual, maka semakin tinggi penerapan konservatisme akrual.

c. *Discretionary Accrual*

Pengertiannya adalah suatu ukuran untuk mengetahui besarnya manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang paling sering digunakan adalah *Discretionary Accrual Model Kasznik* (1999) yakni dengan memasukkan unsur selisih arus kas operasional.



### 2.2.3 *Corporate Governance*

Menurut Tunggal (2011) *corporate governance* adalah hubungan antara *stakeholders* yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja perusahaan. Pengertian *corporate governance* menurut Cadbury Committe dalam Jama'an (2008:36) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi, *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* demi tercapainya tujuan perusahaan.

Prinsip-prinsip untuk menerapkan *good corporate governance* adalah:

a. *Transparancy*

Perusahaan mengelola bisnisnya secara transparan dengan semua *stakeholders* baik perusahaan yang terlibat secara langsung maupun tidak. Para pengelola perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara transparan, jujur dan tidak manipulatif kepada pemegang saham.

b. *Accountability*

Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien karena adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan.

c. *Responsibility*

Perusahaan harus memperhatikan secara andal, keamanan lingkungan dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan produktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

d. *Independency*

Pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada pengaruh dari pihak lain dengan sikap yang profesional dan tanpa adanya konflik kepentingan.

e. *Fairness*

Perlakuan yang adil dan setara terhadap *stakeholder* dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid agar pekerjaan berjalan seperti apa yang diharapkan dan semua peraturan yang ada ditaati untuk melindungi semua orang yang berkepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.

Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah menggunakan frekuensi rapat komisaris independen dan kompetensi komite audit. Hal ini disebabkan dalam mencapai integritas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari pihak internal saja, pihak eksternal juga merupakan salah satu faktornya. Oleh karena itu, komisaris independen dan komite audit yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan.

#### **2.2.4 Komisaris Independen**

Menurut Bapepam No. Kep-29/PM/2004, pengertian komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, dan juga tidak mempunyai afiliasi atau hubungan usaha yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.

Menurut Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan dengan adanya komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Jadi, komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan dan berfungsi menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Emirzon, 2007). Dengan adanya komisaris independen dapat memberikan laporan keuangan yang berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak eksternal diluar manajemen perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik menjelaskan penyelenggaraan pengelolaan yang baik, perusahaan yang tercatat harus memiliki komisaris independen, jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (minoritas) dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris.

Kriteria komisaris independen menurut Bapepam No. Kep-29/PM/2004 yaitu:

1. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Komisaris independen tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham atau perusahaan publik.
4. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

#### **2.2.4.1 Frekuensi Rapat Komisaris Independen**

Efektivitas komisaris independen dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pihak komisaris independen menyelenggarakan pertemuan minimal tiga atau empat kali setiap tahunnya. Dengan pertemuan secara teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komisaris independen dalam mengawasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, lebih objektif dalam tindakan-tindakan atau kinerja manajemen. Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komisaris independen dapat mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan

keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga nantinya akan terciptanya *good corporate governance* dan menjamin manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholder*.

### **2.2.5 Komite Audit**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan komite audit.

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Hal ini terutama yang berkaitan dengan manfaat komite audit di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dewan komisaris.

Dengan adanya komite audit dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern sehingga dapat mengawasi kegiatan manajemen (Susiana dan Herawaty, 2007).

Berikut adalah tugas komite audit yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris menurut Peraturan Bapepam No. Kep-29/PM/2004:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengajuan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

Sehingga transparansi informasi yang dikemukakan oleh manajemen sangat ditentukan oleh keberhasilan audit dalam menjalankan tugasnya sebagai sistem pengawasan keuangan dan transparansi pelaporan perusahaan.

#### **2.2.5.1 Kompetensi Komite Audit**

Komite audit diharuskan mempunyai kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya. Keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh komite audit yang disyaratkan oleh BAPEPAM. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisa informasi

dalam laporan keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif dalam perusahaan. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi atau tanggap mengenai perubahan dan inovasi (Rahmat, *et al.*, 2008). *Fraud* manajemen dan penyimpangan pengawasan internal akan menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pelacakan kecurangan bisa diatasi dengan komite audit yang kompeten. Pengawasan kinerja perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila komite audit dengan anggota yang mempunyai kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit yang memiliki kompetensi diharapkan dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang lebih baik.

### **2.2.6 Leverage**

Secara umum, *leverage* digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban (hutang) jangka panjangnya. Suatu perusahaan berupaya menjelaskan kewajibannya jika perusahaan tersebut memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Menurut Mareta (2015) menyatakan *leverage* secara eksplisit adalah rasio hutang yang digunakan untuk memperhitungkan perbandingan antara total kewajiban dengan total ekuitas.

*Leverage* adalah sampai sejauh mana jumlah pendanaan perusahaan yang diperoleh dari hutang atau kekayaan perusahaan yang dapat dijamin oleh hutang

dibandingkan dengan dana sendiri (Hanafi dan Halim, 2009:79). Jika terjadi peningkatan *leverage* yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dalam membiayai aktivitasnya sangat bergantung pada pinjaman *eksternal*. Dan jika perusahaan mempunyai *leverage* yang tinggi berarti perusahaan mempunyai resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. hal ini yang menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas daripada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah. Tetapi, resiko yang dihadapi oleh investor akan meningkat sehingga mereka akan menuntut untuk mendapatkan pengembalian investasi yang besar. Kondisi ini akan memicu manajemen untuk melaporkan laba yang *overstatement* yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak berintegritas.

### **2.2.7 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dapat diklasifikasikan dengan besar dan kecilnya perusahaan dalam berbagai cara. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), perusahaan kecil (*small firm*). Menurut Saputra, et al (2014) menyatakan perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa instrumen seperti total penjualan, total aset, jumlah karyawan dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin



besar penjualan, maka semakin besar perputaran uang dalam perusahaan dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka perusahaan tersebut semakin dikenal masyarakat. Semakin besar nilai instrumen, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga kebijakan perusahaan besar akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi dan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan menerapkan prinsip konservatif.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi**

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Susiana & Herawati (2007) menjelaskan tujuan komisaris independen untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Fungsi komisaris independen adalah *memonitoring* agar tercipta perusahaan yang memiliki *good corporate governance* dan mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam teori keagenan, pengawasan merupakan salah satu komponen dalam *good corporate governance*. Dengan pengawasan yang baik dapat mengurangi perilaku opportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen. Efektivitas komisaris independen dalam melakukan peran pengawasan kinerja perusahaan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan atau rapat secara rutin. Dengan melaksanakan rapat secara periodik, komisaris independen dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen. Semakin sering komisaris independen mengadakan rapat, maka akses informasi akan semakin merata diantara anggota, sehingga akan menghasilkan keputusan yang bermanfaat, kinerja perusahaan lebih baik dan laporan keuangan yang dihasilkan berintegritas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) diperoleh kesimpulan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, dkk (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian penjelasan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H<sub>1</sub> : Frekuensi rapat komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

### **2.3.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit

ekstern. Peran komite audit juga merupakan salah satu upaya dalam memonitoring kegiatan operasional perusahaan, kontrol internal, dan proses akuntansi perusahaan. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisa informasi dalam laporan keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif dalam perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pihak prinsipal dan pihak agen, komite audit diharuskan mempunyai kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya. Keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh komite audit yang disyaratkan oleh BAPEPAM. Komite audit yang memiliki kompetensi diharapkan dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang lebih baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandini dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ammy (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian penjelasan di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

### 2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Konservatisme Akuntansi

*Leverage* adalah proporsi total hutang atau modal yang membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Apabila perusahaan diberi pinjaman oleh kreditur, maka kreditur mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya dan menghasilkan laba atau keuntungan.

Berdasarkan teori keagenan, asimetri informasi antara kreditur dan perusahaan berkurang karena manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan dimanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan perusahaan yang *berleverage* lebih rendah. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti perusahaan mempunyai resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang nantinya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, dkk (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dan Ratnadi (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian penjelasan di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi**

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar (Ardi dan Lana, 2007). Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan, dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan teori keagenan, untuk menghindari konflik keagenan dari pihak prinsipal dan pihak agen yang sama-sama menginginkan keuntungan yang besar dan menghindari adanya resiko, seringkali pihak prinsipal menanamkan sahamnya di perusahaan yang berukuran besar. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena informasi yang didapat lebih banyak dan karyawan yang ahli dan berkualitas lebih memahami integritas laporan keuangan. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi dan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih

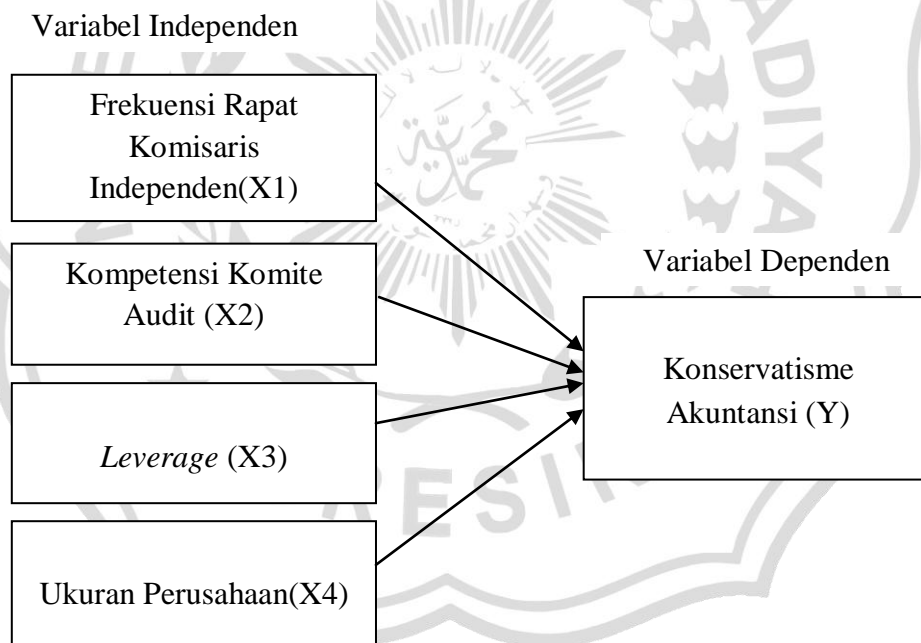
transparan sehingga perusahaan akan menerapkan prinsip konservatif dengan menyajikan laba rendah (*understatement*).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dan Ratnadi (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian penjelasan di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> :Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diketahui kerangka konseptual dari penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

#### Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mencari bukti empiris tentang pengaruh variabel independen yaitu frekuensi rapat komisaris independen, kompetensi komite audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dengan menggunakan analisis regresi linier logistik sebagai teknik analisis data.

Dengan melaksanakan rapat secara rutin, komisaris independen dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen. Semakin sering komisaris independen mengadakan rapat, maka akses informasi akan semakin merata diantara anggota, sehingga akan menghasilkan keputusan yang bermanfaat, kinerja perusahaan lebih baik dan laporan keuangan yang dihasilkan berintegritas.

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisa informasi dalam laporan keuangan. Komite audit yang memiliki kompetensi dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang lebih baik.

Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang

saham dan pemegang obligasi yang nantinya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif.

Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi dan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan sehingga perusahaan akan menerapkan prinsip konservatif dengan menyajikan laba rendah (*understatement*).

